

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Hubungan Internasional

Hubungan Internasional merupakan suatu cabang dari ilmu politik yang membahas tentang isu-isu luar negeri dan global dalam sistem internasional, termasuk peran negara, organisasi antar pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan-perusahaan multinasional. Hubungan Internasional menggunakan berbagai bidang ilmu seperti politik, ekonomi, sejarah, hukum, filsafat, geografi, sosiologi, antropologi, psikologi, studi-studi budaya dalam kajian-kajiannya. Hubungan Internasional mencakup rentang isu yang luas, dari globalisasi dan dampak-dampaknya terhadap masyarakat-masyarakat dan kedaulatan negara sampai kelestrarian ekologis, proliferasi nuklir, nasionalisme, perkembangan ekonomi, terorisme, kejahatan yang terorganisasi, keselamatan umat manusia, dan hak-hak asasi manusia. Hubungan Internasional juga termasuk suatu proses interaksi yang terjadi antar bangsa untuk dapat mencapai suatu tujuan. Hubungan tersebut dapat berupa suatu interaksi antar individu, interaksi antar kelompok, dan juga hubungan antarnegara.

HI sendiri memiliki 3 teori yang populer, yaitu realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Teori hubungan internasional dapat dibagi menjadi teori "positivis/rasionalis" yang berfokus pada analisis tingkat negara, dan "pascapositivis/reflektivis" yang mencakup arti keamanan yang lebih luas, mulai dari

keamanan kelas, jenis kelamin, hingga pascakolonial. Banyak cara berpikir yang bertentangan dalam teori HI, termasuk konstruktivisme, institusionalisme, Marxisme dan lain-lain. Bagaimanapun juga, dua pemikiran positivis muncul sebagai teori dominan, yaitu realisme dan liberalisme; meski konstruktivisme terus memosisikan diri sebagai arus utama (Reus-Smit 2005).

Terdapat empat sarana yang sering disebutkan dalam *global studies*, diantaranya:

1) Diplomasi

Sarana hubungan antarbangsa untuk memperjuangkan politik nasional dalam konteks hubungan antarbangsa. Dalam diplomasi, daya dan upaya dikerahkan untuk mencapai tujuan nasional. Dalam hubungannya dengan bangsa lain, diplomasi diselenggarakan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi apakah kepentingan nasional suatu bangsa sejalan atau bertentangan dengan kepentingan bangsa lain. Proses diplomasi bisa berujung kesepakatan, kesepakatan melalui sinergi atau syarat, atau bisa pula ketidaksepakatan.

2) Propaganda

Usaha sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan kelompok demi memenuhi kepentingan masyarakat ketimbang pemerintahnya. Propaganda tidak dilakukan untuk mensinergikan kepentingan yang bertentangan. Dengan kata lain, kepentingan yang menjadi tujuan final adalah kepentingan pihak yang melakukan propaganda.

3) Perdagangan

Sarana hubungan antarbangsa yang dilibatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi antara pihak-pihak yang berhubungan. Perdagangan internasional umumnya muncul karena ketidakmampuan negara untuk memproduksi dan mengonsumsi semua kebutuhan negaranya sendiri. Kerjasama dalam bentuk perdagangan merupakan solusi praktis sekaligus problematis karena beresiko menciptakan ketimpangan dan ketergantungan.

4) Militer

Sarana hubungan antarbangsa melalui latihan kemiliteran bersama dalam rangka memperkuat pertahanan negara-negara yang terlibat diplomasi. Latihan militer bersama juga merupakan wujud adanya kesepakatan untuk mengantisipasi serangan yang mungkin melanda salah satu pihak. Apabila salah satu pihak diserang, maka pihak lain membantu. Bantuan bisa berupa serdadu yang diturunkan atau suplai peralatan kemiliteran.

2.1.1.1. Hubungan Bilateral

Suatu bentuk kerjasama diantara negara-negara yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi. (Kusumohamidjojo, 1987: 3). Terselenggaranya hubungan bilateral juga tidak terlepas dari tercapainya beberapa kesepakatan antara dua negara yang melakukan hubungan yang mana mereka mengabdikan pada kepentingan nasionalnya dalam usaha untuk menyelenggarakan politik luar negerinya masing-masing. Dengan tujuan nasional yang ingin dicapai suatu bangsa dapat terlihat dari kepentingan

nasional yang dirumuskan oleh elit suatu negara. Hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara didunia ini pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional merupakan unsur yang sangat vital yang mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.

Selanjutnya, dalam kamus politik internasional, Didi Krisna mendefinisikan konsep tentang hubungan bilateral adalah sebagai berikut, bahwa “hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua belah pihak (dua negara)”. (Krisna, 1993, 18). Hubungan bilateral yang dimaksud adalah kerjasama dibidang ideology, politik, ekonomi, hokum, keamanan. Namun dalam penulisan ini yang akan dibahas adalah hubungan bilateral yang difokuskan pada kerjasama ekonomi. Adapun menurut Holsty dan Azhary tentang Variabel-Variabel yang harus diperhitungkan dalam kerjasama bilateral adalah:

- a) Kualitas dan kuantitas kapabilitas yang dimiliki suatu negara.
- b) Keterampilan mengerahkan kapabilitas tersebut untuk mendukung berbagai tujuan.
- c) Kredibilitas ancaman serta gangguan.
- d) Derajat kebutuhan dan ketergantungan
- e) Responsivitas di kalangan pembuat keputusan. (Holsty, 1988, 22)

Hubungan bilateral mengandung dua unsure pemaknaan, yakni: konflik dan kerjasama. Antara keduanya memiliki arti yang saling bergantian tergantung dari

konssep apa yang ditawarkan antara kedua negara menurut motivasi-motivasi internal dan opini yang melingkupinya. Setiap terbinanya hubungan bilateral yang diupayakan oleh suatu negara dengan negara lain dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan diantara keduanya. Seperti yang dikemukakan oleh Coplin bahwa: Melalui kerjasama internasional, negara-negara berusaha memecahkan masalah sosial, ekonomi dan politik. Tipe yang pertama menyangkut kondisi-kondisi di lingkungan internasional yang apabila tidak diatur akan mengancam negara-negara yang terlibat... Tipe kedua mencakup keadaan sosial, ekonomi dan politik domestik tertentu yang dianggap membawa konsekuensi luas terhadap sistem internasional sehingga dipersepsikan sebagai masalah internasional bersama. (Coplin, 1992, 263).

Selanjutnya dalam konsepsi ideal pengambilan keputusan politik luar negeri senantiasa memperhatikan nilai-nilai ideal, yaitu membentuk system yang lebih menawarkan pola dan tata cara hidup politik dalam arti yang seluas-luasnya, bebas dari kekurangan materil serta bebas untuk mengembangkan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan. Dalam kaitannya dengan *rationality and foreign policy*, bahwa perwujudan atau penentu sasaran, obyek atau mitra hubungan merupakan pillihan yang rasional dengan memperhitungkan sirkumstansi internasional dan kondisi domestik demi meminimalisasi kerugian politik serta mempertahankan posisi politik dipentas internasional. Oleh karena itu hal ini sangat penting untuk diperhatikan dari efisiensi dan tujuan yang ingin dicapai (Viotti, 1987, 527). Adapun sisi lain yang dapat ditimbulkan dari adanya hubungan bilateral adalah bias jadi mengandung makna konflik dan kerjasama.

2.1.2. Kepentingan Nasional

Dalam hubungan internasional maupun studinya, terdapat elemen yang berkontribusi dalam perkembangannya. Elemen tersebut adalah aktor, interest, dan power. Ketiga hal tersebut berkorelasi satu sama lain dalam membentuk suatu identitas negara. Sebelum sebuah negara dapat mewujudkan suatu identitas, maka setiap elemen tersebut perlu dikembangkan. Aktor adalah pelaku penggerak terjadinya suatu hubungan diplomasi antar negara. Setiap tindakan yang dilakukan oleh aktor dilatar belakangi suatu tujuan, dan tujuan tersebut mengarah pada terciptanya kepentingan nasional. Adapun fungsi dari national interest itu sendiri adalah sebagai panduan bagi para pemimpin dalam melakukan hubungan luar negeri dan patokan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam melakukan hubungan luar negeri.

Beberapa ahli memiliki pandangan berbeda dalam mendefinisikan arti kepentingan nasional. Hans J Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan nasional merupakan alat untuk mengejar kekuasaan, karena melalui kekuasaan-lah suatu negara dapat mengontrol negara lain. Singkatnya, konsep kepentingan nasional adalah kemampuan negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain (Morgenthau, 1978). Selain Morgenthau, Felix E. Oppenheim menjelaskan konsep kepentingan nasional sebagai tujuan kesejahteraan pemerintahan nasional dalam level internasional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kepentingan nasional dari suatu negara adalah untuk menjaga otonomi politik dan integrasi nasionalnya demi keberlangsungan kesejahteraan masyarakatnya sampai ke tahap internasional. Secara garis besar kepentingan nasional adalah tujuan, cita-cita dan harapan yang ingin dicapai oleh suatu negara (Oppenheim, 1987).

Untuk mencapai kepentingan nasional, suatu negara menentukan suatu kebijakan-kebijakan luar negeri untuk mengatur negara agar lebih jelas dalam menjalin suatu hubungan internasional. Kepentingan nasional secara tidak langsung juga berfungsi sebagai akses suatu negara untuk melihat fenomena-fenomena antar batas negara. Aktivitas negara dalam hubungan internasional juga perlu diperhatikan karena setiap tindakan yang dilakukan harus melihat kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan oleh negara tersebut. Kepentingan nasional dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu berdasarkan kepentingannya, sifatnya dan cakupannya.

Menurut kepentingannya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu : (1) *Primary interest* adalah kepentingan utama yang mengatakan bahwa perlindungan identitas politik dan budaya suatu negara tidak dapat diganggu gugat dan wajib bagi negara untuk memenuhi kepentingannya tanpa adanya jalur tengah dalam perwujudannya; (2) *Secondary interest* muncul ketika *primary interest* terpenuhi dan pergerakan *secondary interest* akan selalu mengikuti *primary interest*, dapat dikatakan *secondary interest* tidak akan terwujud sebelum *primary interest* terlaksana terlebih dulu. Menurut sifatnya kepentingan nasional dibedakan menjadi *permanent interest*, yaitu kepentingan yang bersifat konsisten dan berlaku jangka panjang dan *variable interest* bersifat fleksibel terhadap kondisi negara manapun. Sedangkan menurut cakupannya dibedakan menjadi dua, yaitu *general interest* yang mencakup dalam jumlah besar/meliputi berbagai aspek dan *specific interest* yang merupakan pengembangan dari *general interest* dan diterapkan dalam waktu dan tempat tertentu (Robinson, 1967).

Pada hakikatnya kepentingan nasional ditentukan oleh keputusan negara. Keputusan yang dibuat negara tentunya harus memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dan tidak boleh ditentukan secara sepihak. Bentuk dari kepentingan nasional antara lain seperti hubungan diplomasi antar negara yang baik, atau kepentingan lain yang dapat melindungi aset diplomasi suatu negara (Clinton, 1986). Kepentingan nasional berasal dari kebutuhan masyarakat negara tersebut, serta cita-cita negara untuk menjadi negara yang ideal. Sebab kepentingan nasional adalah inti dari tujuan dan cita-cita negara. Sehingga negara merupakan penggerak utama dalam berhasil atau tidaknya pencapaian kepentingan nasional.

Kepentingan nasional dapat dicapai dengan beragam cara seperti pembangunan berkelanjutan, program-program pemerintah, bahkan kerjasama internasional. Kepentingan nasional dan negara merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Ketika melakukan interaksi dengan dunia internasional, setiap negara pasti membawa tujuan masing-masing dan dalam kepentingan nasional juga, negara membawa visi dan misi bagaimana kepentingan nasional suatu negara mendapat bantuan agar dapat terakomodasi dan segera tercapai dalam jangkauan waktu yang efisien.

2.1.3. Reunifikasi

Reunifikasi merupakan salah satu aspek kehidupan bernegara, yaitu bersatunya kembali dua atau lebih unit politik dan segala aspeknya (secara menyeluruh). Reunifikasi adalah penyatuan negara terpisah atau unit politik lainnya di bawah kekuasaan yang sama. Integrasi dapat berlangsung sebagai fenomena internasional

atau regional, yang dapat dilihat sebagai proses ataupun hasil yang merupakan refleksi dan semangat kerjasama antarnegara dalam anarki internasional (Viotti & Kauppi, 1998:481). Reunifikasi tidak jauh berbeda dengan integrasi. Integrasi di dunia internasional bertambah pesat setelah Perang Dingin berakhir. Menurut Ernst Haas, seperti yang dikutip oleh Mochtar Masoed dalam bukunya, Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi, integrasi didefinisikan sebagai proses aktor-aktor di beberapa wilayah nasional yang berbeda yang terdorong untuk memindahkan kesetiaan, harapan dan kegiatan politik mereka ke suatu pusat baru yang lembaga-lembaganya memiliki dan menuntut yurisdiksi atas negara-negara nasional yang ada sebelumnya (Masoed, 1994:153). Integrasi juga dapat diartikan bahwa kepekaan terhadap komunitas telah tercapai, di mana masyarakat telah setuju bahwa konflik dan masalah dapat terselesaikan tanpa pengerahan kekuatan fisik dalam skala yang besar (Jackson & Sorensen, 1999:111). Keterkaitannya dengan Perang Dingin, negara-negara yang mengalami pemisahan struktural seperti Korea dan Jerman merupakan wujud entitas yang merefleksikan dorongan integrasi, atau secara lebih tepat adalah reunifikasi.

Keinginan untuk mengadakan reunifikasi disebabkan adanya rasa nasionalisme. Ada beberapa anggapan mengenai nasionalisme:

- 1) Nasionalisme memperkenalkan demokrasi.
- 2) Nasionalisme mendorong penentuan nasib sendiri (self-determination).
- 3) Nasionalisme mendukung pembangunan ekonomi.
- 4) Nasionalisme menyebabkan integrasi.
- 5) Nasionalisme menyebabkan disintegrasi.

- 6) Nasionalisme menyebabkan perpecahan dan kesusahan.
- 7) Nasionalisme dapat menimbulkan xenofobia.
- 8) Nasionalisme dapat menimbulkan perasaan superioritas.
- 9) Nasionalisme dapat menimbulkan jingoistik.
- 10) Nasionalisme memungkinkan munculnya sifat agresif. (Minix & Hawley, 1998:89).

Nasionalisme bisa menjadi kekuatan yang membangun (*positive force*) atau menjadi kekuatan yang merusak (*destructive force*). Sebagai kekuatan yang membangun nasionalisme dapat digunakan sebagai alat untuk menggalang persatuan dan kesatuan (Minix & Hawley, 1998:88-89). Nasionalisme dapat menjadi kekuatan yang berguna apabila menimbulkan makna identitas (*sense of identity*) dan rasa memiliki (*sense of belonging*) bagi individu. Nasionalisme bisa menjadi kekuatan yang merusak apabila suatu negara menganggap suatu peranan yang lebih tinggi bisa dicapai dengan mengorbankan wilayah dan kesejahteraan negara lain atau suatu kelompok etnis minoritas dengan merusak hak-hak yang dimilikinya (Coulombis & Wolfe, 1990:83-84).

Muncullah skenario reunifikasi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mewujudkan reunifikasi. Skenario reunifikasi dapat dikelompokkan menjadi empat bidang, yaitu reunifikasi melalui penyerapan, reunifikasi secara damai dan terintegrasi, reunifikasi melalui perang atau konflik, serta reunifikasi melalui campur tangan asing (Jonathan, 2001).

- a) Reunifikasi melalui Penyerapan

Reunifikasi ini dimaksudkan dengan melakukan penyerapan satu negara kepada negara lainnya atau pengambil alihan suatu negara oleh negara lainnya.

b) Reunifikasi secara Damai.

Reunifikasi secara damai dimaksudkan dengan adanya konsesus bersama kedua negara.

c) Reunifikasi melalui Perang

Reunifikasi ini dimaksudkan dengan menggunakan kekuatan.

d) Reunifikasi melalui Campur Tangan Asing

Reunifikasi ini dimaksudkan dengan masuknya campur tangan asing sebagai penengah.

2.1.4. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan bentuk strategi ataupun tindakan yang dibuat oleh para pemangku kepentingan dalam menghadapi negara lain dan dilakukan untuk mencapai tujuan nasional tertentu yang diwujudkan dalam terminologi kepentingan nasional (Plano & Olton, 1999).

Pada hakekatnya, kebijakan luar negeri merujuk pada sebuah fenomena dimana negara-negara akan berusaha untuk memenuhi kepentingan nasionalnya di dunia internasional. Kebijakan luar negeri muncul karena setiap negara tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan secara mandiri. Oleh karena itu, pemerintah suatu negara pastinya akan berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan yang tidak dapat dipenuhinya secara mandiri tersebut di luar batas-batas wilayah teritorialnya (Amstutz,

2013). Kebijakan luar negeri juga sangat erat kaitannya dengan kepentingan nasional, sehingga pemaparan kedalam tujuan kebijakan luar negeri (*foreign policy objective*) yang lebih signifikan dan dapat diukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, sangat diperlukan (Triwahyuni 2008).

Kebijakan luar negeri merupakan hasil dari *decision making process*. Sehingga keduanya memiliki keterkaitan, dimana segala hal yang terjadi dalam *decision making process* akan mempengaruhi kebijakan luar negeri yang ditetapkan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi dalam *decision making process* yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berada pada ruang lingkup internal suatu negara, seperti ekonomi, kapabilitas militer, dan sistem pemerintahan.

Ada lima variabel penting yang dapat mempengaruhi sebuah *decision making process*, yaitu :

1) Variabel Individu

Sebuah persepsi tentang pengaruh individu dalam proses menentukan kebijakan luar negeri dimana unsur individu hanya akan memiliki pengaruh jika ia memiliki *power*. Selain itu, unsur individu cenderung lebih berpengaruh pada sebuah sistem yang otoriter, totaliter daripada demokrasi.

2) Variabel Grup

Berhubungan dengan aktor-aktor atau kelompok-kelompok yang berada disekitar aktor utama dimana mereka memiliki kesempatan untuk memasukkan kepentingannya dalam *decision making process*. Para kelompok tersebut bisa

mempengaruhi proses pengambilan sebuah keputusan jika kepentingan yang mereka miliki tersebut relevan dan mereka juga memiliki power atau posisi untuk masuk dalam sebuah aktor utama. Contohnya adalah kelompok partai politik dan kelompok kepentingan.

3) Variabel Birokrasi

Terkait dengan adanya birokrasi sebuah negara. Keputusan tentu juga akan mempertimbangkan masukan-masukan dari departemen yang ada dalam birokrasi sebuah negara. Fungsi pemerintah yang kompleks membuat organisasi-organisasi berkembang luas sebagai bagian dari eksekutif. Birokrasi diartikan sebagai kumpulan berbagai individu serta organisasi di dalam lembaga eksekutif yang membantu para pembuat keputusan dalam membuat kebijakan luar negeri. Anggota birokrasi terkadang adalah anggota kelompok pembuat keputusan sehingga sulit untuk memisahkan keduanya sehingga hal itulah yang menjadikan kelompok birokrasi sangat berperan dalam pembuatan kebijakan.

4) Variabel Nasional

Unsur ini berkaitan dengan keadaan domestik atau internal sebuah negara, misalnya adalah ukuran luas wilayah, ideologi, budaya, letak geografis, iklim dan sumber daya yang dimiliki termasuk karakteristik masyarakatnya.

5) Variabel Global

Unsur global melingkupi eksternal sebuah negara, termasuk misalnya adalah agenda dan isu internasional yang sedang terjadi (Juanda, 1997).

Salah satu bentuk eksistensi dari sebuah negara dapat dilihat melalui kebijakan luar negerinya. Hal ini tidak terlepas bahwa kebijakan luar negeri suatu negara mencerminkan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya dan menunjukkan karakter negara tersebut. Kebijakan luar negeri suatu negara sangat berpengaruh terhadap eksistensinya dalam dunia internasional. Dimana didalam kebijakan luar negeri pasti berkaitan dengan adanya interaksi antar negara.

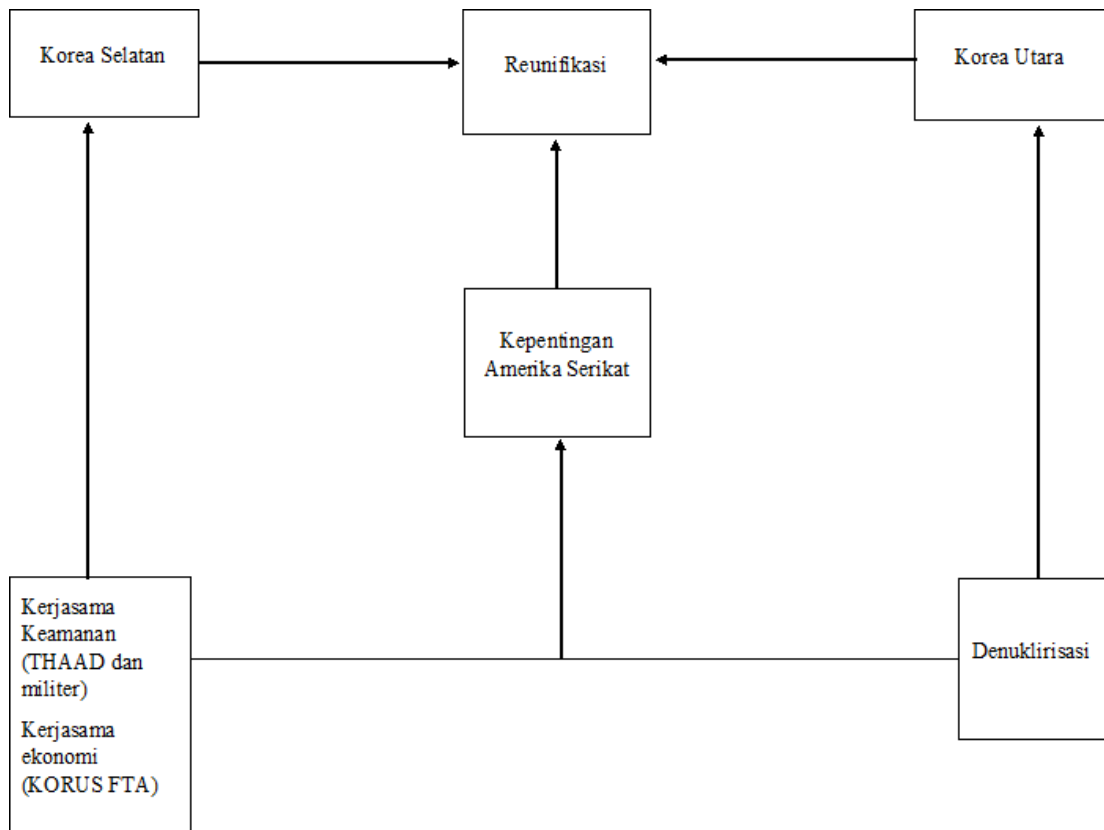
2.2. Kerangka Pemikiran

Korea terpecah pada saat terjadinya Perang Dingin, dimana aktor penentunya adalah Uni Soviet dan Amerika Serikat. Dua negara adidaya tersebut bersaing dalam menyebarkan ideologinya masing-masing ke penjuru dunia. Korea hingga saat ini masih terpecah meskipun Perang Dingin telah berakhir. Korea Selatan dan Korea Utara masih memegang teguh ideologi turunan dari Amerika Serikat dan Uni Soviet. Meskipun terpisah, hasrat untuk mempersatukan kembali Korea selalu ada bagi Utara dan Selatan. Kedua negara tersebut melakukan berbagai cara demi mencapai kata sepakat perihal reunifikasi, dimana kedua negara melakukan langkah diplomasi untuk membahas persoalan reunifikasi. Kedua negara juga melakukan kerjasama bilateral demi memperlancar proses reunifikasi. Namun, kenyataannya baik dalam diplomasi maupun kerjasama selalu ada perdebatan yang akhirnya membuat proses reunifikasi ini stagnan.

Keinginan Korea untuk reunifikasi didasarkan pada sejarah panjang dan membanggakan dari kesatuan yang melihat Korea berkembang menjadi negara budaya yang memiliki etnis homogen dengan rasa persatuan mendalam. Latar belakang ini

yang mendorong dua Korea untuk kembali bersatu meskipun selama beberapa waktu terjadi ketegangan dan permusuhan antara Utara dan Selatan. Untuk kebanyakan orang Korea, pembagian semenanjung Korea hanyalah sebuah penyimpangan sementara dan cepat atau lambat akan dapat diselesaikan. Meskipun ada keinginan untuk reunifikasi, tetapi dengan banyaknya perbedaan antara Utara dan Selatan dirasa akan sulit untuk mempersatukannya. Terlebih lagi adanya intervensi dari pihak lain, seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Terlebih lagi kehadiran Amerika Serikat disana dianggap sebagai pemegang peran penting.

Hadirnya Amerika Serikat di semenanjung Korea dikarenakan mereka memiliki kepentingan tersendiri. beberapa kepentingan Amerika Serikat diantaranya denuklirisasi, keamanan dan ekonomi. Amerika Serikat sangat berambisi untuk bisa menghilangkan nuklir di Korea Utara yang dianggap sebagai ancaman bagi dunia. Amerika Serikat juga bekerja sama dengan Korea Selatan yang menghasilkan penerapan *Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)* di Korea Selatan untuk menangkal serangan rudal nuklir dari Korea Utara. Selain itu, ditempatkannya militer-militer Amerika Serikat di Korea Selatan untuk berjaga-jaga terhadap ancaman Korea Utara merupakan kepentingan lain dari Amerika Serikat dalam bidang keamanan. Bukan hanya untuk berjaga-jaga semata, pasukan militer Amerika Serikat dan Korea Selatan pun sering melakukan latihan militer bersama. Dalam bidang ekonomi, Amerika Serikat dan Korea Selatan bekerja sama membentuk *KORUS FTA (United States – Korea Free Trade Area)*.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran